

STRATEGI MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA RISIKO DI INSTANSI PEMERINTAH

Penulis:

Mutmainna¹
Miki Keliata²
Aranti Putri Aulia Nurlita³
Ulfa Amaliya⁴
Azzahra Tunnisa⁵

Afiliasi:

¹⁻⁵Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia

Korespondensi:

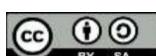
mutmainnahamir694@gmail.com

Riwayat Naskah

Diterima 01-10-2025
Disetujui 13-11-2025
Diterbitkan 18-11- 2025

Hak Cipta:

©2023. Penulis. Licensi: Al-Mumtaz. This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license

**Abstrak**

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik karena bertujuan mengurangi potensi kerugian finansial sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kelangsungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, khususnya dalam mencegah kerugian anggaran serta mendorong efisiensi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan kajian pustaka, dengan sumber data berupa karya ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, serta standar internasional terkait manajemen risiko di instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko yang efektif berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Penerapan kebijakan mitigasi risiko juga memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapiancaman perubahan regulasi maupun tekanan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan, manajemen risiko berperan penting dalam mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, manajemen risiko tidak hanya melindungi aset organisasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Strategi, Manajemen Risiko, Instansi, Pemerintah.

Abstract

Risk management is an important element of good governance because it aims to reduce potential financial losses while strengthening accountability and organizational sustainability. This study aims to explore the role of risk management in improving the performance of government organizations, particularly in preventing budget losses and promoting efficiency. The research method used a qualitative approach through document analysis and literature review, with data sources in the form of scientific papers, research reports, official documents, and international standards related to risk management in government agencies. The results showed that the implementation of effective risk management strategies had a positive impact on improving organizational performance, accountability, transparency, and efficiency in the implementation of government tasks. The implementation of risk mitigation policies also strengthens organizational resilience in the face of regulatory changes and economic pressures. This study concludes that risk management plays an important role in preventing corruption, increasing budget

efficiency, strengthening internal oversight, and fostering public trust in the government. With a comprehensive approach, risk management not only protects organizational assets but also improves the quality of public services and supports the achievement of national development goals.

Keyword: Strategy, Risk Management, Institutions, Government.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas yang terus meningkat, instansi pemerintah menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko ini mencakup aspek keuangan, operasional, hukum, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan manajemen strategik dalam pengelolaan risiko menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Manajemen strategik memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara proaktif. Manajemen risiko di sektor publik memiliki tantangan unik dibandingkan sektor swasta. Instansi pemerintah sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan. Keterbatasan anggaran dan kompleksitas regulasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi manajemen risiko. Oleh karena itu, pendekatan strategik yang holistik diperlukan untuk menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan dan memprioritaskan sumber daya secara efektif (Raditya, 2018).

Pengelolaan risiko di instansi pemerintah juga harus mempertimbangkan kerangka hukum dan peraturan yang ada. Peraturan pemerintah sering kali memberikan panduan tentang bagaimana organisasi harus mengelola risiko. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan terarah dapat memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam merancang dan menerapkan strategi manajemen risiko. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi (Garcia et al., n.d.). Kebijakan ini memperkuat mekanisme kontrol internal yang diperlukan untuk mengurangi risiko operasional dan keuangan. Selain itu, dukungan dari pimpinan dan komitmen terhadap budaya sadar risiko sangat penting untuk keberhasilan penerapan strategi ini. Pimpinan harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks manajemen risiko, tugas utama seorang pemimpin risiko adalah menentukan arah dan kebijakan risiko dalam organisasi dan berkomitmen untuk mengkulturasikan budaya risiko yang efektif.

Orang yang mengetahui risiko yang signifikan yaitu orang yang paling berpengaruh atau penting di dalam suatu organisasi. Jadi dalam melakukan analisa risiko sebaiknya dimulai dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan tertinggi dari suatu unit usaha. Ada tiga metode mendasar yang dapat digunakan untuk menemukan risiko yang signifikan. Pertama, identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh untuk memahami potensi ancaman yang dapat mengganggu fungsi organisasi. Teknik-teknik seperti survei dan wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan memancarkan dampak serta probabilitas terjadinya setiap risiko. Proses ini memungkinkan instansi untuk memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya (Vella Sephia Arianto & Syadzadhiya Qothrunada Z, 2025).

Dalam implementasinya, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menangani risiko, antara lain menghindari risiko, mengurangi dampak risiko, membagi

risiko dengan pihak lain, serta menerima sebagian dari konsekuensi risiko tersebut. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga pemilihan strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik dari instansi dan jenis risikonya. Misalnya, dalam situasi tertentu, mengalihkan risiko ke pihak ketiga mungkin lebih efektif dibandingkan dengan mencoba mengurangi dampak secara internal. Salah satu tantangan utama dalam penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman sangat diperlukan untuk menjalankan program manajemen risiko secara efektif(Irianto & Amirya, 2024). Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM menjadi aspek penting dalam strategi pengelolaan risiko.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Instansi pemerintah perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih pegawai mereka dalam mengelola risiko secara profesional. Program pelatihan yang terstruktur dapat membantu pegawai memahami pentingnya manajemen risiko dan bagaimana menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Dengan SDM yang terampil, instansi dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan risiko yang muncul. Kerjasama antar instansi dan lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengelola risiko yang kompleks. Misalnya, dalam menghadapi risiko bencana alam, instansi pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta(Rusna Rustam, 2018). Kerjasama ini memungkinkan sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mengurangi dampak risiko.

Evaluasi dan peninjauan ulang terhadap strategi manajemen risiko harus dilakukan secara rutin. Risiko bersifat dinamis, sehingga strategi yang efektif pada satu waktu mungkin tidak relevan di masa depan (Sidiqurrohman et al., 2024). Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memiliki sistem pemantauan yang terus diperbarui untuk menilai efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Proses evaluasi ini juga memberikan peluang untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi sebelumnya. Aspek keberlanjutan dalam manajemen risiko juga semakin penting, terutama dalam menghadapi risiko lingkungan seperti perubahan iklim (Idrus & Usi, 2024). Instansi pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan dalam strategi mereka untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan lingkungan dapat dikelola dengan baik. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan mitigasi, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan yang tidak dapat dihindari. Dengan menggabungkan semua elemen tersebut, manajemen risiko di instansi pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Strategi yang terintegrasi dan komprehensif memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya mengurangi dampak negatif dari risiko, tetapi juga memanfaatkan peluang yang muncul (Junarto, 2023). Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Menerapkan manajemen risiko adalah metode yang sudah teruji dan terbukti memiliki banyak keuntungan. Dengan melakukan hal ini, para manajer dapat mencegah apa yang dikenal sebagai “shock effect” dari kondisi yang berpotensi mengganggu di masa depan. Hal ini karena manajemen telah mengantisipasi kondisi tersebut sebelumnya, dan ketika kondisi tersebut terjadi, manajemen telah menyiapkan program mitigasi untuk meminimalkan dampak negatifnya. Secara keseluruhan, strategi manajemen untuk pengelolaan risiko di instansi pemerintah merupakan proses yang kompleks namun krusial. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, instansi pemerintah dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa mereka tetap dapat memberikan layanan publik yang optimal (Jauhari et al., 2021). Melalui identifikasi yang tepat, evaluasi yang mendalam, serta penerapan strategi

mitigasi yang sesuai, instansi pemerintah akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi pentingnya teknik manajemen risiko dalam instansi pemerintah dan bagaimana strategi ini dapat meningkatkan efektivitas operasional organisasi. Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efisien merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan dengan memahami kompleksitas risiko yang dihadapi oleh lembaga pemerintah. Melalui penjelasan tentang kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas dan dukungan pimpinan, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi dapat mengembangkan budaya sadar risiko dan penerapan strategi manajemen yang berkelanjutan. Selain itu, jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk mempersiapkan pegawai menghadapi risiko yang dinamis. Oleh karena itu, jurnal ini ingin menekankan bahwa pengelolaan risiko bukan hanya sekedar usaha mitigasi, melainkan juga sebagai cara untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan keberhasilan jangka panjang bagi instansi pemerintah. Melalui analisis dan evaluasi yang mendalam, penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan praktik manajemen risiko di sektor publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen dan kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data ilmiah yang relevan, terutama berupa teori, metode, serta hasil penelitian sebelumnya. Sumber data meliputi buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, jurnal, yang berkaitan dengan strategi manajemen risiko. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara mendalam guna memahami strategi manajemen risiko di instansi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur terkini yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel ilmiah yang membahas taktik manajemen risiko di sektor pemerintah, publikasi resmi dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta standar internasional ISO 31000:2018. Pemilihan sumber data mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu validitas untuk menjamin keakuratan informasi, relevansi dengan fokus penelitian, dan kebaruan agar hasil penelitian tetap aktual sesuai kebutuhan saat ini. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah. Kajian pustaka digunakan untuk mengontekstualisasikan penerapan strategi dalam kerangka lokal maupun global. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, tidak hanya sejalan dengan standar internasional, tetapi juga sesuai dengan tantangan dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja manajemen risiko yang lebih kuat, mendukung tata kelola organisasi publik, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di instansi pemerintah.

HASIL

Manajemen risiko di instansi pemerintah adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Langkah pertama dalam proses ini adalah identifikasi risiko, di mana potensi ancaman terhadap operasi atau kebijakan organisasi dikenali melalui analisis mendalam, seperti analisis SWOT atau peta risiko (Risk Map). Selanjutnya, risiko yang telah teridentifikasi perlu dinilai berdasarkan kemungkinan (Ahmad, 2019) dan dampaknya terhadap instansi. Manajemen risiko yang baik tidak hanya penting untuk menghadapi ancaman, namun juga untuk menciptakan peluang bagi organisasi pemerintah. Dengan memahami potensi risiko sejak dulu, lembaga-lembaga dapat

mengambil langkah-langkah yang lebih tepat sasaran dalam mengembangkan strategi untuk mencegah atau mengurangi dampak. Misalnya, jika suatu lembaga menghadapi risiko keterlambatan pelaksanaan proyek karena kurangnya koordinasi antar departemen, mereka dapat memperkuat komunikasi internal melalui teknologi digital dan pertemuan rutin. Dengan cara ini, tidak hanya risiko keterlambatan yang bisa diminimalkan, namun kualitas kerja dan hubungan antar departemen juga bisa ditingkatkan.

Setelah risiko dinilai, instansi dapat menerapkan strategi mitigasi yang sesuai. Strategi ini mencakup menghindari risiko dengan mengubah aktivitas yang berisiko, mengurangi risiko melalui kontrol internal, mengalihkan risiko dengan asuransi, atau menerima risiko dengan rencana penanganan yang terencana (Rahmi et al., 2024). Penting bagi instansi untuk melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap efektivitas strategi mitigasi tersebut melalui audit berkala dan pemantauan indikator kinerja utama (KPI). Komunikasi yang transparan dan pelibatan pemangku kepentingan juga menjadi elemen penting dalam mengelola risiko. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaporan risiko secara rutin dan membangun budaya kesadaran risiko di seluruh tingkatan organisasi (Sari & Syaifullah, 2020). Budaya ini diperkuat dengan integrasi manajemen risiko ke dalam strategi organisasi dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan inisiatif dalam pengelolaan risiko. Akhirnya, evaluasi dan pembelajaran dari implementasi strategi risiko dilakukan untuk memastikan proses manajemen risiko terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan eksternal. Dengan langkah-langkah ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menghadapi ketidakpastian secara efektif, menjaga integritas layanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Strategi manajemen untuk mengelola risiko di instansi pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi guna mencapai efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Salah satu strategi utama adalah identifikasi dan evaluasi risiko secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari semua tingkat organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang memungkinkan identifikasi potensi ancaman dan peluang. Selain itu, instansi pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengelola risiko, termasuk dalam pengendalian risiko keuangan, operasional, reputasi, serta risiko hukum dan regulasi. Penggunaan teknologi informasi yang mendukung sistem manajemen risiko berbasis data dapat meningkatkan akurasi dalam memonitor dan mengendalikan risiko secara real-time. Selanjutnya, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang peka terhadap risiko. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis risiko dan cara penanganannya, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa tujuan jangka panjang tercapai dengan meminimalisir potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, penting bagi instansi pemerintah untuk memiliki *framework* atau kerangka kerja manajemen risiko yang jelas dan terintegrasi. Misalnya, penerapan standar internasional seperti ISO 31000 yang menyediakan pedoman dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis. Kerangka kerja ini memungkinkan instansi untuk menghubungkan manajemen risiko dengan perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan operasional. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan bahwa semua risiko yang muncul, baik risiko

internal maupun eksternal, dapat diantisipasi dengan lebih baik. Keberhasilan manajemen risiko juga memerlukan dukungan teknologi yang tepat. Penggunaan perangkat lunak berbasis *risk management information systems* (RMIS) dapat membantu dalam dokumentasi, pelacakan, dan pemantauan risiko secara real-time. Selain itu, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara proaktif. Implementasi teknologi ini, jika didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, akan memberikan keuntungan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas manajemen risiko.

Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya juga menjadi elemen penting dalam memperkuat strategi manajemen risiko. Instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan memastikan bahwa pembelajaran tersebut diintegrasikan ke dalam rencana strategis di masa depan. Hal ini dapat membantu menciptakan fleksibilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan yang dinamis. Dengan pendekatan yang holistik, sistematis, dan adaptif, instansi pemerintah tidak hanya dapat mengelola risiko secara efektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan seluruh pihak, mulai dari manajemen hingga staf operasional, merupakan elemen kunci dalam membangun budaya sadar risiko. Ketika seluruh anggota organisasi memahami pentingnya perannya dalam proses manajemen risiko, maka organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Penggunaan teknologi dan pelatihan yang berkelanjutan akan semakin memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleks di masa depan.

PEMBAHASAN

Dalam era kompleksitas dan dinamika yang terus berkembang, instansi pemerintah menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan strategis organisasi. Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu strategi manajemen risiko yang berlandaskan kerangka SNI ISO 31000:2018, implementasi manajemen risiko di instansi pemerintah, serta langkah-langkah penilaian risiko yang mendalam. Selain itu, akan diulas tujuan, manfaat, serta pentingnya kelembagaan yang mendukung dan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola yang baik (Good Governance). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana strategi yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

1. Strategi Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah mengalami berbagai macam risiko, termasuk operasional, reputasi, keuangan, dan kepatuhan. Untuk menangani risiko ini, diperlukan rencana manajemen risiko yang sistematis agar layanan publik tetap dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya, Manajemen Risiko wajib diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, serta menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan penilaian risiko secara berkala (Astari, 2020). Kementerian Keuangan merupakan

instansi pemerintah yang paling awal mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnisnya.

Walaupun pedoman penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah secara umum mengadopsi SNI ISO 31000:2018. Dalam implementasinya, terdapat instansi pemerintah yang melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuntutan untuk mencapai Good Governance di dalam birokrasi semakin memperkuat pentingnya penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah. Menurut UNDP (United Nations Development Program), Good Governance adalah praktik dalam penggunaan kekuasaan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan secara politik, ekonomi, dan administratif di semua level (Oktapiani et al., 2021). Manajemen Risiko dan Good Governance memang saling terkait dengan baik, di mana Manajemen Risiko bertugas mengidentifikasi dan menangani risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Manajemen Risiko memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Good Governance. ISO 31000:2018 terdiri atas tiga elemen utama, yaitu menetapkan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), dan penanganan risiko. ISO 31000:2018 juga mencakup dua elemen pendukung, yaitu komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan peninjauan. Strategi pengelolaan risiko dalam lembaga pemerintah berperan penting dalam membentuk organisasi yang kuat dan cepat tanggap terhadap masalah. Melalui metode yang diantisipasi dan sistematik, pemerintah bisa menjamin kelangsungan kegiatan, mengurangi kerugian, serta mempertahankan kepercayaan publik (Rajendra & Saptadi, 2024).

2. Implementasi Manajemen Risiko Di Instansi Pemerintah

Implementasi manajemen risiko adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk menemukan, menilai, mengatur, dan mengawasi risiko dalam sebuah organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintah, penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang dapat menghalangi tujuan organisasi dapat dikelola dengan baik. Pembangunan tim manajemen risiko yang efektif adalah fondasi penting dalam implementasi manajemen risiko di organisasi, khususnya instansi pemerintah (Ramdhani, 2006a). Dengan anggota yang terlatih, struktur yang jelas, dan dukungan sumber daya, tim ini dapat membantu organisasi mengelola risiko secara proaktif dan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih baik. Selanjutnya pengembangan sistem manajemen risiko adalah proses membangun kerangka kerja, prosedur, dan teknologi yang mendukung organisasi dalam mengelola risiko secara terstruktur dan efektif (Zahra Yans Shafiyah, et al. 2023) . Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam proses organisasi agar risiko dapat diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau secara berkelanjutan.

Implementasi manajemen risiko di instansi pemerintah Indonesia berpedoman pada SNI ISO 31000:2018, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Pimpinan instansi diwajibkan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan melakukan penilaian risiko secara berkala. Proses manajemen risiko mencakup, identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko, serta pemantauan dan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi nilai organisasi dan meningkatkan kinerja instansi (Nasution, 2021). Meskipun sudah ada pedoman, tantangan seperti kurangnya pemahaman SDM dan pengidentifikasi risiko yang kurang tajam masih dihadapi. Pentingnya sosialisasi dan pendidikan tentang manajemen risiko sangat diperlukan untuk membangun

budaya sadar risiko di birokrasi lingkungan(Suseno & Kuntoro, 2024). Dengan meningkatnya pemahaman ini, instansi pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola risiko yang ada, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Implementasi yang baik diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih prudensial dan responsif terhadap tantangan yang ada. Secara keseluruhan, manajemen risiko merupakan instrumen penting yang digunakan organisasi pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Menerapkan manajemen risiko dapat menjadi komponen penting dalam operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintah jika para pemimpin menunjukkan komitmen mereka kepada staf mereka.

3. Langkah- Langkah Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Berikutnya adalah tahap penilaian risiko, yang mengikuti ISO 31000:2018. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Masri et al., 2022):

a. Komunikasi dan konsultasi

Agar bisnis dan akademisi dapat bersama-sama memahami risiko, beberapa strategi manajemen risiko, serta data dan informasi yang diperlukan, maka langkah-langkah penilaian risiko yang luas saat ini menjadi topik utama diskusi.

b. Menjelaskan ruang lingkup, latar belakang, dan kriteria.

Fase ini menjelaskan latar belakang dan kriteria penilaian secara rinci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengkategorikannya berdasarkan kriteria risiko. Risiko dapat dikurangi dengan mengelola transaksi penjualan dengan Sistem Informasi Operasi Cerdas. Dampak dan kemungkinan adalah dua kriteria risiko yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko.

c. Evaluasi risiko

Teknik penilaian risiko yang digunakan dalam penelitian ini disebut Failure Modes and Effects Analysis, atau FMEA. Pendekatan ini mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, mengevaluasi kemungkinan terjadinya, memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi pada organisasi jika risiko tersebut terwujud, dan kemudian secara kritis memeriksa setiap risiko. Dengan menentukan peringkat risiko, teknik FMEA ini membantu dalam pengambilan keputusan pemeliharaan. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko (*Risk Identification*) dengan melakukan observasi dan wawancara untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada pada program aplikasi, kemudian menentukan kemungkinan risiko dan dampak dari setiap pilihan fitur yang ada pada sistem informasi.
- 2) Analisis risiko (*Risk Analysis*) mengintegrasikan dan mengukur kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai preferensi risiko perusahaan. Oleh karena itu, kriteria risiko diperlukan. Kriteria dampak digunakan untuk menilai besarnya dampak kerugian risiko terhadap organisasi, sedangkan kriteria kemungkinan digunakan untuk menilai frekuensi suatu risiko. Nilai risiko ditentukan dengan mengalikan kedua faktor tersebut.
- 3) Evaluasi risiko (*risk evaluation*) memetakan risiko pada 3 ruang, yaitu ruang hijau untuk risiko rendah (*low risk*), ruang kuning untuk risiko menengah (*medium risk*), dan ruang merah untuk risiko tinggi (*high risk*). Hasil dari evaluasi risiko ini adalah ukuran atau level risiko dari masing-masing risiko yang dianalisis

- d. Perlakuan risiko.

Dengan memberikan rekomendasi penanganan risiko, langkah terakhir ini berupaya mengidentifikasi taktik yang akan mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya. Tolak, Turunkan, Transfer, dan Terima adalah empat kategori perlakuan risiko (Charles R. Vorst, D.S Priyarno, 1385).

4. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko Secara umum, manajemen risiko adalah fondasi untuk memperkirakan risiko yang mungkin terjadi secara akurat melalui perhitungan yang cermat dan penilaian yang cermat terhadap berbagai fakta awal untuk menghindari kerugian. Meskipun demikian, berikut ini adalah tujuan spesifik dari manajemen risiko:

1. Memberitahukan kepada pihak berwenang tentang potensi bahaya.
2. Menurunkan kerugian dari berbagai bahaya yang tidak diinginkan dan tidak dapat dikelola.
3. Mengalokasikan sumber daya dan mengelola bahaya.
4. Mempertahankan operasi dengan pengembangan yang berkelanjutan.

Demikian pula dalam konteks pelaksanaannya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus mempertimbangkan risiko yang perlu dikendalikan serta akuntabilitas sebagai dasar umum penyelenggaraan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kapasitas instansi pemerintah, OPD, untuk :

1. Menetapkan tujuan dan rencana kinerja
2. Mencocokkan jumlah yang direncanakan dan dianggarkan.
3. Membandingkan pencapaian kinerja yang dianggarkan dan dilaporkan dengan keluaran dan hasil aktual untuk menentukan apakah keduanya selaras. Serangkaian teknik dan proses yang dikenal sebagai manajemen risiko digunakan untuk mengenali, mengukur, melacak, dan mengelola potensi bahaya (Ramdhani, 2006).

Membantu instansi pemerintah mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasionalnya secara efektif, metodis, dan terukur merupakan manfaat utama manajemen risiko bagi pemerintah. Berikut ini adalah ringkasan manfaat dari manajemen risiko, seperti yang disebutkan dalam laman situs web bpkp.go.id:

1. Memastikan bahwa manajemen risiko benar-benar difokuskan untuk meminimalkan dampak dari potensi bahaya, membantu manajemen memperkirakan dampak risiko.
2. Membantu manajemen menetapkan prioritas untuk masalah yang dihadapi sehingga dapat ditangani secara efektif, murah, dan efisien sesuai dengan hasil yang diinginkan.
3. Membantu manajemen dalam meminimalkan kesalahan, mencegah kecurangan, dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
4. Membantu manajemen dalam menilai peluang prospektif untuk meningkatkan hasil layanan dan alternatif kontrol untuk kemungkinan manajemen risiko.

5. Kelembagaan Manajemen Risiko

Salah satu unsur penentu terselenggaranya tata kelola manajemen risiko adalah kelembagaan yang baik dimana terdapat struktur organisasi yang berfungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan manajemen di suatu organisasi(Collins et al., 2021). Dalam penerapan manajemen risiko, struktur manajemen melengkapi manajemen organisasi, yang pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah daerah dan disusun berdasarkan tingkat hirarki pekerjaan. Dukungan manajemen ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kinerja memenuhi tujuan dengan cara yang terbaik. Hal ini merupakan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tim Satgas SPIP dapat berperan sebagai tim pengendali mutu organisasi atau sebagai auditor internal. Tanggung jawab tim sebagai bagian dari proses asurans termasuk menilai dan menganalisis secara rutin bagaimana program dan kegiatan dilaksanakan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengukuran hasil..

Tujuan utama dari sektor pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, namun juga harus bertahan dan berkembang. Dibandingkan dengan sektor komersial, manajemen risiko berkembang lebih lambat di sektor publik. Namun, saat ini hanya ada sedikit jawaban dan sedikit teori tentang manajemen risiko di sektor publik (Firdausijah et al., 2023). Dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik tidak terlalu berbahaya. Dibandingkan dengan bisnis, pemerintah lebih pasti. Secara keseluruhan, pemerintah memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan bisnis perusahaan, prosedur manajemen risiko merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Di sektor publik, komunikasi risiko sering kali diabaikan. Kemudian, manajemen risiko juga digunakan oleh pemerintah atau sektor publik. Pemerintah dapat menerapkan manajemen risiko. COSO ERM dan ISO 31000 adalah dua ide manajemen risiko yang signifikan dan terkait dalam bisnis. Semua jenis organisasi dapat menggunakan kerangka kerja risiko karena sifatnya yang universal (Ludmilla, 2023). Dengan mengelola risiko, ada peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan peluang kegagalan yang lebih rendah. Kemungkinan untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkat ketika manajemen secara efektif mengurangi risiko. Manajemen risiko digunakan oleh sektor publik dan pemerintah untuk meningkatkan standar prosedur akuntabilitas. Pemerintah akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh dengan memasukkan manajemen risiko ke dalam instrumen pertanggung jawaban. Sektor publik telah mengalami peningkatan dalam manajemen risiko dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen publik yang baru mencakup manajemen risiko.

KESIMPULAN

Risiko merupakan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kestabilan instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko tersebut. Strategi manajemen risiko yang efektif di instansi pemerintah memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan yang terus-menerus. Dengan menerapkan strategi ini, instansi pemerintah dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Pentingnya penerapan peraturan atau kebijakan yang mengatur manajemen risiko dalam instansi pemerintah. Adanya payung hukum yang jelas, seperti peraturan pemerintah atau pedoman internal, dapat membantu memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, dukungan kepemimpinan, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor

utama keberhasilan implementasi manajemen risiko. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Strategi manajemen risiko yang efektif di instansi pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko dapat membantu mengurangi potensi kerugian sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Faktor-faktor utama keberhasilan meliputi komitmen dari pimpinan, partisipasi seluruh elemen organisasi, penerapan teknologi pendukung, serta penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung kesadaran risiko perlu dikembangkan melalui pelatihan, komunikasi, dan kolaborasi antarunit kerja. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap aspek operasional, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, kepercayaan publik, dan responsivitas terhadap tantangan yang terus berkembang. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas manajemen risiko demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. M. (2019). Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1182–1192.
- Astari, I. Z. (2020). Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Dengan Aplikasi Enterprise Risk Management Pada Pt Bukit Asam Tbk. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59077>
- CHARLES R. VORST, D.S PRIYARSONO, A. B. (1385). *MANAJEMEN RESIKO BERBASIS SNI ISO 31000* (Vol. 17).
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RESIKO*.
- Firdausijah, T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, Sunariyanto, Fauzan, R., Sagena, U., & Amane, A. P. O. (2023). Manajemen Sektor Publik. In *Manajemen Sektor Publik* (Issue October). www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Peningkatan kualitas pelayanan publik*.
- Idrus, M. R. H., & Usi, U. A. N. (2024). REALISASI PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs): TUJUAN-13.1.3. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(1), 77–100. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.509>
- Irianto, G., & Amiry, M. (2024). Kendala dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 302–312. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i2.84241>
- Jauhari, R., Sukmadilaga, C., & Mulyani, S. (2021). Implementasi dan critical success factor manajemen risiko di instansi Pemerintah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 285–298. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11911>
- Junarto, R. (2023). Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya

- Agraria: Wawasan dari Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(3), 237–254. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219>
- Ludmilla, R. (2023). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemerintahan Negara-Negara di Asia. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(11), 2487–2501. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.675>
- Masri, D., Umar Abidin, A., & Brontowiyono, W. (2022). Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Teknik Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Pengecoran, Yogyakarta. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 28(2), 1–11.
- Nasution, A. R. S. N. (2021). Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 164–171. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad>
- Oktapiani, F., Rosmiati, M., & Indrawati P, L. (2021). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah The Implementation Of Risk Management In Order To Realize The Principles Of Good Governance At Regional Government Of West Bandung Regency. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 378–385.
- Raditya, E. (2018). *Manajemen risiko ISO 31000:2018 Pedoman*. Jenewa: ISO. Risk Management – Guidelines, Switzerland. Scribd.Com. <https://www.scribd.com/document/864348180/ISO-31000-2018-Risk-Management-Guidelines-Indonesia>
- Rahmi, H., Andrean, K., & Hasibuan, A. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan Perusahaan Industri di Era Digital. *Factory Jurnal Industri, Manajemen Dan Rekayasa Sistem Industri*, 3(1), 37–40. <https://doi.org/10.56211/factory.v3i1.559>
- Rajendra, R., & Saptadi, S. (2024). Identifikasi Dan Analisis Risiko Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Metode Risk Matrix (Pt . Kernel Indonesia Potential). *Industrial Engineering Online Journal*, 13(4), 5. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/46715/31972>
- Ramdhani, D. H. (2006a). Manajemen Risiko & Manajemen Risiko. In *Dep. K3 FKMUI* (Issue april).
- Ramdhani, D. H. (2006b). Manajemen Risiko & Manajemen Risiko. *Dep. K3 FKMUI*, april, 54–58.
- Sari, A. A., & Syaifullah, J. (2018). Komunikasi Organisasi (Telaah Pola Prilaku Komunikasi Organisasi Pedesaan). *Journal of Social Sciences and Politics*, 11(1), 96–113.
- Sidiqurrohman, D. S., Syah, T. Y. R., Negoro, D. A., & Iskandar, M. D. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Perencanaan Bisnis PROPTech. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 51–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1051>
- Suseno, G., & Kuntoro, S. (2024). Hambatan dan Solusi dalam Digitalisasi Layanan Publik di Negara Berkembang. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 1(1). https://www.researchgate.net/publication/380720816_Hambatan_dan_Solusi_dalam_Digitalisasi_Layanan_Publik_di_Negara_Berkembang
- Vella Sephia Arianto, & Syadzadhiya Qothrunada Z. (2025). Analisis Manajemen Risiko terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Metode HIRARC di Pelabuhan Tanjung Perak. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan*, 3(2), 240–256. <https://doi.org/10.61132/globe.v3i2.833>

Xiang, W. K. (2018). KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LUWU UTARA.

Zahra Yans Shafiyah, Nandita Fathia Mahbubah, Anggun Yiniqa Azhar, F. R. S. (2023). *Optimalisasi Kinerja Tim Kerja Dalam Organisasi: Memahami Dinamika Dan Kolaborasi Yang Efektif.* UMM.AC.ID. <https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/jurnal-post/optimalisasi-kinerja-tim-kerja-dalam-organisasi-memahami-dinamika-dan-kolaborasi-yang-efektif.html>